



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

- Nama** : IRA SAVITRI
- Jabatan** : VICE PRESIDENT PERENCANAAN SISTEM KETENAGALISTRIKAN SULAWESI, MALUKU, PAPUA, DAN NUSA TENGGARA
- NHK** : 521419

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.250.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 860.000.000

- MOBIL, KIA PICANTO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
- MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
- MOBIL, HONDA CRV PRESTIDGE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 242.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 83.013.113

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.435.013.113

III. HUTANG Rp. 317.803.820

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.117.209.293

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.